

Peran Bagian Keuangan Dan BMN Dalam Mendukung Operasional Di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

Sri Lestari¹, Chusnah², M. Ridwan³, Asman⁴, Chodijah Nasution⁵, Ekta Azara⁶
^{1,2,3,4,5,6}Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta
Corresponding Email:srilestari.feb@uia.ac.id

Abstract

This community service aims to analyze the financial section and the management of State-Owned Goods (BMN) in supporting the operations of the Ciliwung Cisadane River Basin Organization (BBWS). Identifying the challenges faced in financial management and State-Owned Goods (BMN) management. Providing recommendations to improve the efficiency and effectiveness of financial management and optimize the use of state assets (BMN) to support the BBWS's tasks in water resource management. The method used is a qualitative approach, including in-depth interviews conducted with finance department employees, BMN managers, and relevant parties at BBWS Ciliwung Cisadane, direct observation of the financial and asset management processes in the BBWS work environment, and document analysis, including financial reports, BMN inventory documents, and relevant regulations. The purpose of this service is to assist in the smooth allocation of budgets, management of expenditures, and financial reporting. So that the implementation of operational activities complies with the applicable regulations. Meanwhile, the management of state assets contributes to the effectiveness of asset utilization, from planning, procurement, to maintenance. Some of the challenges faced include, among others, the limited availability of competent human resources, lack of integration in information systems, and administrative hurdles that slow down the financial and BMN management processes.

Keywords: Financial Role, BMN, Ciliwung River, Cisadane

Abstrack

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis bagian keuangan dan pengelola Barang Milik Negara (BMN) dalam mendukung operasional Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan BMN. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi penggunaan aset negara (BMN) guna mendukung tugas BBWS dalam pengelolaan sumber daya air. Metode yang digunakan dengan metode pendekatan Kualitatif antara lain: Wawancara mendalam yang dilakukan dengan pegawai bagian keuangan, pengelola BMN, dan pihak terkait di BBWS Ciliwung Cisadane, melakukan pengamatan langsung bagaimana proses pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan kerja BBWS. Melakukan analisis dokumen, menganalisis laporan keuangan, dokumen inventarisasi BMN, serta regulasi yang relevan. Tujuan pengabdian ini untuk membantu kelancaran alokasi anggaran, pengelolaan belanja, dan pelaporan keuangan. Agar pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, pengelolaan BMN berkontribusi terhadap efektivitas penggunaan aset negara, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pemeliharaan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya integrasi sistem informasi, serta kendala administratif yang memperlambat proses pengelolaan keuangan dan BMN.

Kata Kunci: Peran Keuangan, BMN, Sungai Ciliwung, Cisadane

PENDAHULUAN

Keberlanjutan operasional organisasi pemerintah memerlukan dukungan administratif yang kuat, terutama dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Di Balai Besar

Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Kementerian PUPR, peran bagian keuangan dan BMN menjadi sangat strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tersebut dalam mendukung operasional organisasi secara optimal. Sejarah Berdirinya Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur.



Gambar 1.1 Logo DKI Jakarta



Gambar 1.2 Logo Walikota
Administrasi Jakarta Timur

Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, memiliki karakteristik kekhususan tersendiri dibandingkan dengan daerah provinsi lainnya. Kompleksitas Jakarta selalu berkaitan erat dengan keberadaan sebagai pusat pemerintahan, faktor luas wilayah yang terbatas dan populasi penduduk yang tinggi. Krisis multi dimensi yang kompleks sekarang ini, membawa implikasi pada kondisi masyarakat Jakarta yang rentan terhadap timbulnya gejolak sosial yang diwarnai kekerasan, sehingga masyarakat cenderung mencari jalan pintas dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Kondisi sosial tersebut seringkali terjadi tindak pelanggaran diluar koridor hukum yang ada, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu, upaya menanggulangi masalah tersebut diperlukan metode penanganan melalui kelembagaan secara tepat dan terencana dengan baik. Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom tidak hanya dihadapkan pada permasalahan sosial di Jakarta, tetapi lebih banyak muncul permasalahan yang berskala nasional yang dilakukan oleh para elit, individu, golongan, atau kelompok yang tentunya mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat Jakarta, sehingga diperlukan fasilitasi untuk mencapai keharmonisan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, Suku Badan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan penunjang pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dan demokrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan
- b) Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan
- c) Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahaman ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingkup Kota Administrasi
- d) Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan pada lingkup Kota Administrasi
- e) Fasilitasi penyelenggaraan tugas kewaspadaan pada lingkup Kota Administrasi
- f) Fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi pada lingkup Kota Administrasi
- g) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Administrasi
- h) Penyusunan bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan pada bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Administrasi
- i) Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum pada lingkup Kota Administrasi pengelolaan dukungan teknis dan administratif pada SKPD/UKPD dan pihak terkait lainnya pada lingkup Kota Administrasi
- j) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Badan
- k) Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Badan
- l) Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Suku Badan
- m) Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan.

LATAR BELAKANG

BBWS Ciliwung Cisadane memiliki tugas pokok dan fungsi yang melibatkan pengelolaan sumber daya air dalam skala besar. Kegiatan operasionalnya mencakup pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir, dan konservasi air. Untuk menjalankan tugas ini, diperlukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta pengelolaan BMN yang efisien. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran bagian keuangan dan BMN dapat mendukung keberhasilan program dan kegiatan BBWS Ciliwung Cisadane.

Pendapat para pakar yang disampaikan oleh (Santoso, 2020) dari Universitas Gadjah Mada, dalam bukunya *Manajemen Keuangan Publik: Transparansi dan Akuntabilitas*, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik memerlukan sistem pengawasan yang terintegrasi agar dapat mendorong efisiensi operasional, menurut pendapat (Kartika, 2018), Universitas Indonesia, dalam artikel *Tantangan Pengelolaan BMN di Indonesia*, mengidentifikasi bahwa kurangnya pelatihan teknis menjadi hambatan utama dalam pengelolaan BMN yang efisien sedangkan pendapat (Setiawan, 2022) Universitas Hasanuddin, dalam buku *Manajemen SDA di Kawasan Perkotaan*, menyarankan penggunaan teknologi berbasis data untuk meningkatkan akurasi pengelolaan keuangan dan aset negara.

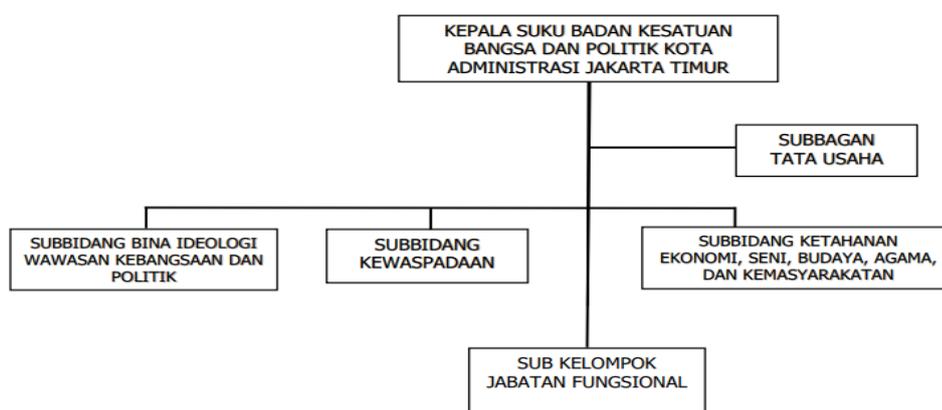
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayati, 2019) dari Institut Teknologi Bandung, melalui penelitian berjudul *Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan*, menekankan pentingnya integrasi antara pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset untuk mendukung keberlanjutan program konservasi air. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad Fauzi, 2021), yang berlokasi di Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, dalam jurnal *Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Air*, menyebutkan bahwa sinergi antara manajemen keuangan dan BMN dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek infrastruktur air.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan BMN di BBWS Ciliwung Cisadane antara lain: Banyaknya regulasi yang harus dipatuhi seringkali menimbulkan hambatan administratif, Tidak semua staf memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan BMN, Kesulitan dalam melakukan inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan aset yang tidak lagi digunakan, Kurangnya sinergi antara Bagian Keuangan dan BMN dengan bagian lain di BBWS.

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi peran strategis bagian keuangan dalam mendukung operasional BBWS Ciliwung Cisadane.
2. Untuk mengkaji pengelolaan BMN dan kontribusinya terhadap keberlanjutan operasional.
3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sinergi antara bagian keuangan dan BMN.

Struktur Organisasi

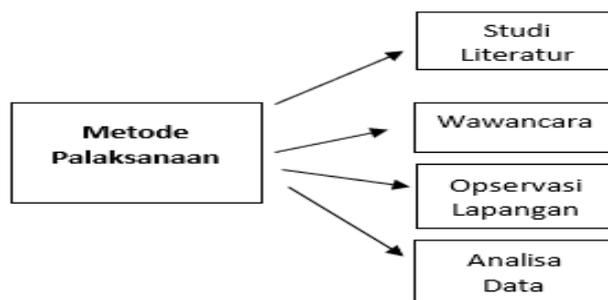


Gambar 1.3 Struktur organisasi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur

Landasan Teori

1. **Pengelolaan Keuangan Publik**
Menurut teori manajemen keuangan publik, pengelolaan keuangan yang baik mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan audit.
2. **Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)**
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Kelola BMN, pengelolaan BMN harus efektif, efisien, dan transparan.
3. **Sinergi Antar Fungsi**
Konsep sinergi antar fungsi organisasi menekankan pentingnya koordinasi lintas unit untuk mencapai tujuan bersama.

METODE PELAKSANAAN



Gambar 1.4 Metode Pelaksanaan

Penjelasan, sebagai berikut:

1. Studi literatur dengan cara mengkaji berbagai regulasi, pedoman, dan best practices terkait pengelolaan keuangan dan BMN.
2. Wawancara, dengan melakukan wawancara dengan staf bagian Keuangan dan BMN di BBWS Ciliwung Cisadane.
3. Observasi lapangan, dengan melakukan pengamatan langsung proses pengelolaan keuangan dan BMN di BBWS.
4. Analisis data, dengan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bagian Keuangan, bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Efisiensi pengelolaan keuangan telah mendukung kelancaran berbagai proyek infrastruktur di wilayah BBWS Ciliwung Cisadane. Bagian BMN telah melakukan pengelolaan aset-aset, termasuk alat berat, gedung, dan infrastruktur lainnya. Pengelolaan yang terstruktur membantu mengurangi potensi kerugian aset negara. Tantangan yang dihadapi adanya keterbatasan sumber daya manusia yang terampil di bidang BMN. Kendala dalam proses audit keuangan yang memerlukan waktu dan tenaga SDM. Sinergi antara bagian keuangan dan BMN telah dilakukan melalui koordinasi rutin untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan aset.

Hasil penelitian ini sebagai berikut, antara lain:

1. Bagian Keuangan memiliki peran penting dalam memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional, namun masih terdapat kendala dalam pencairan dana akibat prosedur yang panjang.
2. Bagian BMN berhasil melakukan inventarisasi aset secara berkala, tetapi menghadapi kendala dalam pemanfaatan aset yang kurang optimal.
3. Terdapat beberapa proyek yang tertunda akibat kurangnya koordinasi antara Bagian Keuangan, BMN, dan bagian teknis lainnya.
4. Pelatihan dan peningkatan kapasitas staf masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kompetensi yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan BMN.

KESIMPULAN

Bagian keuangan dan BMN memiliki peran strategis dalam mendukung operasional BBWS Ciliwung Cisadane. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel serta pengelolaan BMN yang efisien telah mendukung kelancaran program dan kegiatan organisasi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan proses audit.

SARAN

Perlu diadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai bagian keuangan dan BMN, untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan aset dan keuangan, antara lain:

1. Menyederhanakan prosedur administrasi untuk mempercepat proses pencairan dana dan pengelolaan aset.
2. Perlu adanya pengembangan sistem manajemen keuangan dan BMN berbasis teknologi untuk efisiensi operasional.
3. Memperkuat koordinasi antar bagian melalui rapat koordinasi rutin dengan membentuk tim koordinasi lintas bagian untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan tugas operasional.
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan BMN guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara proaktif.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fauzi, M. E. (2021). Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya Air. *Manajemen Dan Tehnologi*.

Hidayati, S. (2019). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan. *Institut Teknologi Bandung, 1*.

Kartika, L. (2018). Tantangan Pengelolaan BMN di Indonesia. *Universitas Indonesia*.

Santoso, B. (2020). *Manajemen Keuangan Publik: Transparansi dan Akuntabilitas* (1st ed.). Universitas Gadjah Mada.

Setiawan, H. (2022). *Manajemen SDA di Kawasan Perkotaan* (U. Hasanuddin (ed.)).